

	News Title : Resmi Ditunjuk, ICDX Siap Jadi Bursa Sawit RI	
	Media Name : harianaceh.co.id	Journalist : -
	Publish Date : 11 October 2023	Tonality : Positive
	News Page : 1	News Value : 1,500,000
	Resources : Giri Hatmoko (Head of Corporate Communication ICDX Group)	Ads Value : 500,000
	Section/Rubrication : Bisnis	Topic : Bursa CPO

Resmi Ditunjuk, ICDX Siap Jadi Bursa Sawit RI

Redaksi 11/10/2023 - 15:46 WIB Google News 112



© Hak cipta foto di atas dikembalikan sesungguhnya kepada pemilik foto

JAKARTA — Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi resmi menunjuk Indonesia Commodity and Derivatives Exchange atau ICDX sebagai penyelenggara bursa sawit. Dalam pernyataan resminya, Rabu (11/10/2023), ICDX menyatakan siap menjadi penyelenggaraan dan akan segera meluncurkan bursa.

Head of Corporate Communication ICDX Group, Giri Hatmoko, pun telah mengkonfirmasi persetujuan sebagai penyelenggara pasar fisik minyak sawit atau *crude palm oil* (CPO) dari Bappebti.

Adapun penunjukan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Kepala Bappebti Nomor 1 Tahun 2023, yang dikeluarkan pada tanggal 9 Oktober 2023.

"ICDX berkomitmen penuh untuk menjalankan tugas sebagai penyelenggara pasar fisik CPO di bursa dari pemerintah," kata Giri dalam pernyataan tertulisnya kepada *Republika.co.id*, Rabu (11/10/2023).

Selanjutnya, Giri menyampaikan, ICDX akan menyampaikan hal-hal teknis terkait mekanisme perdagangan dan lain-lain, pada saat Launching Bursa CPO Indonesia bersama dengan Kementerian Perdagangan dan Bappebti.

Bursa sawit itu dirancang sebagai acuan harga CPO Indonesia namun yang dikhususkan untuk ekspor.

"Jadi, yang wajib masuk bursa sawit adalah CPO yang diekspor yaitu dengan kode HS 15.111.000. Harga dalam negeri tidak kami masukkan ke bursa dengan berbagai pertimbangan," kata Kepala Bappebti, Didid Noordiatmoko, beberapa waktu lalu.

Tercatat, rata-rata produksi CPO nasional per tahun sekitar 50 juta ton. Didid menuturkan, volume yang diekspor setahun sekitar 30 juta ton.

"Dari 30 juta ton itu, yang masuk kode HS 15.111.000 itu hanya sekitar 9,75 persen atau mendekati 3 juta ton, inilah yang akan kami wajibkan untuk eksportnya nanti melalui bursa," ujarnya.

Didid melanjutkan, harga yang terbentuk di dalam bursa merupakan harga murni sebelum pajak seperti bea keluar dan pungutan ekspor. Soal lembaga pengelola bursa, Didid menjelaskan hingga saat ini belum ditentukan.